



SEJARAH DAN MODERNISASI TNI ANGKATAN UDARA: IMPLIKASI TERHADAP PERTAHANAN NASIONAL

SEJARAH DAN MODERNISASI TNI ANGKATAN UDARA: IMPLIKASI TERHADAP PERTAHANAN NASIONAL

Raudho Makhbul Hudori¹, Zainul Arifin², Raya Apdilla³, Ahmad Maftuh Sujana⁴

Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: raudhomakhbulhudorixiipa@gmail.com¹, santrituru@gmail.com², raya129037@gmail.com³, maftuhsujana@gmail.com⁴

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. TNI AU, yang secara resmi dibentuk pada 29 April 1946, merupakan bagian integral dari upaya bangsa dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah negara. Penelitian ini memanfaatkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara terhadap veteran, sejarawan, dan saksi sejarah, serta data sekunder dari dokumen, arsip, dan literatur historis. Artikel ini menguraikan peran strategis TNI AU dalam berbagai operasi militer, seperti perebutan pangkalan udara dan penguasaan armada penerbangan dari tangan Jepang dan Belanda, serta kontribusi dalam operasi kemanusiaan. Selain itu, dibahas pula proses modernisasi dan peningkatan profesionalisme TNI AU melalui pelatihan di luar negeri dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). TNI AU tidak hanya menjadi kekuatan pertahanan negara, tetapi juga simbol ketangguhan nasional dalam menghadapi berbagai dinamika politik dan sosial. Dengan penyajian data historis yang mendalam, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai evolusi TNI AU dalam konteks sejarah pascakemerdekaan Indonesia.

Kata Kunci: TNI AU, sejarah, pascakemerdekaan, pertahanan negara, modernisasi.

ABSTRACT

This article examines the history of the Indonesian National Air Force (Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, TNI AU) following Indonesia's proclamation of independence in 1945. Established in April 1946, the TNI AU emerged amid significant political, social, and military challenges during the early years of Indonesia's struggle to maintain sovereignty. The formation and development of TNI AU were marked by limited resources and complex dynamics, including the repurposing of captured aircraft and the integration of former colonial military personnel. The article highlights key phases in TNI AU's evolution, such as its strategic role in major battles like the Five-Day Battle in Semarang and efforts to secure and operate airbases previously controlled by Japanese forces. Moreover, the TNI AU faced continuous political and social challenges, requiring adaptation to changing military doctrines and modernization efforts through international training and procurement of advanced technology. Beyond combat roles, the TNI AU has been actively involved in humanitarian missions and disaster relief, underscoring its broader national significance. This study uses qualitative methods supported by primary interviews, historical documents, and archival data to provide a comprehensive understanding of TNI AU's contributions to Indonesia's defense and state-building processes post-independence. The findings demonstrate the crucial role of TNI AU in safeguarding national sovereignty and advancing Indonesia's military capabilities.

Keywords: Indonesian National Air Force, history, independence, defense, sovereignty.

PENDAHULUAN

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, negara yang baru terbentuk ini dihadapkan pada tantangan

besar dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayahnya. Salah satu komponen utama dalam upaya tersebut adalah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI



AU). TNI AU dibentuk pada 29 April 1946, sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan kekuatan udara yang dapat melindungi wilayah Indonesia dari ancaman luar. Sejak saat itu, TNI AU telah mengalami berbagai transformasi dan perkembangan yang signifikan, baik dari segi struktur organisasi, teknologi, maupun strategi operasional. (Alrianingrum, 2017)

Pada awalnya, TNI AU dibentuk dari beberapa kelompok penerbang yang sebelumnya beroperasi di bawah pemerintahan kolonial. Dalam situasi yang sangat terbatas, di mana sumber daya sangat minim, TNI AU harus berjuang untuk mengembangkan kekuatan udara yang dapat diandalkan. Misalnya, pada tahun 1947, TNI AU berhasil merebut beberapa pesawat terbang dari tangan Belanda, yang kemudian digunakan untuk melakukan operasi-operasi udara yang strategis. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam keadaan darurat, TNI AU mampu mengambil langkah-langkah kreatif untuk memperkuat armadanya. (Saleh, 1995)

TNI AU tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan militer, tetapi juga sebagai simbol perjuangan bangsa. Pengalaman-pengalaman awal TNI AU, seperti dalam Pertempuran 5 Hari di Semarang, menunjukkan bahwa meskipun masih muda, TNI AU mampu beradaptasi dan berkontribusi dalam pertempuran melawan penjajah. Data menunjukkan bahwa selama periode 1945-1949, TNI AU terlibat dalam berbagai operasi militer yang memerlukan keterampilan dan keberanian, meskipun masih minim dalam hal peralatan dan dukungan logistik. (Haryanto, 2010)

Perjuangan TNI AU pasca kemerdekaan juga tidak lepas dari tantangan politik dan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, TNI

AU harus menghadapi berbagai perubahan, termasuk perubahan dalam doktrin militer dan hubungan dengan kekuatan politik. Dalam hal ini, TNI AU berupaya untuk tetap relevan dan adaptif terhadap dinamika yang terjadi di dalam negeri maupun di tingkat internasional. Dalam konteks ini, data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menunjukkan bahwa antara tahun 1950 hingga 1965, TNI AU mengalami peningkatan jumlah personel dan pengadaan alutsista yang signifikan.

Selain itu, perjuangan TNI AU pasca kemerdekaan juga diwarnai dengan upaya untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme anggotanya. Pengiriman pilot-pilot muda ke luar negeri untuk mendapatkan pelatihan merupakan salah satu langkah strategis yang diambil. Misalnya, beberapa pilot TNI AU dikirim ke negara-negara seperti Rusia dan Amerika Serikat untuk belajar tentang teknologi penerbangan modern. Hal ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis mereka, tetapi juga memperluas wawasan dan pengetahuan mereka tentang taktik dan strategi penerbangan yang lebih canggih. (Eko, 2016)

Penting untuk dicatat bahwa TNI AU tidak hanya terlibat dalam operasi militer, tetapi juga dalam misi kemanusiaan dan bantuan bencana. Misalnya, dalam bencana alam yang sering melanda Indonesia, TNI AU sering kali menjadi garda terdepan dalam memberikan bantuan logistik dan evakuasi korban. Selama periode 2000-2020, TNI AU terlibat dalam lebih dari 100 misi kemanusiaan, yang menunjukkan komitmen mereka terhadap kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah dan Latar Belakang Pembentukan TNI Angkatan Udara

Pembentukan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) tidak



dapat dipisahkan dari perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Menurut Oerip Soemohardjo dalam bukunya *Sejarah Tentara Nasional Indonesia* (1952), Angkatan Udara Republik Indonesia secara formal mulai dibentuk pada tanggal 9 April 1946 dengan nama awal "Angkatan Udara Republik Indonesia" (AURI). Proses pembentukan ini terjadi di tengah kondisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari upaya Belanda yang hendak kembali menguasai Indonesia.

Sejarah awal AURI menunjukkan bahwa pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) sangat terbatas dan didominasi oleh pesawat-pesawat sisa peninggalan Jepang dan Belanda yang berhasil direbut atau diselamatkan. Hal ini diperkuat oleh S. Nugroho dalam *Sejarah TNI Angkatan Udara* (2004) yang menegaskan bahwa keberadaan pesawat seperti Dakota, P-51 Mustang, dan berbagai pesawat ringan menjadi modal awal bagi TNI AU untuk menjalankan fungsi pertahanan udara.

Menurut Ricklefs (2008) dalam *A History of Modern Indonesia Since c.1300*, pada masa revolusi fisik 1945–1949, angkatan udara Republik Indonesia berperan penting dalam memberikan dukungan logistik dan transportasi udara kepada pasukan darat, meskipun dalam skala terbatas akibat keterbatasan sumber daya dan teknologi.

Peran TNI AU dalam Masa Revolusi dan Setelah Pengakuan Kedaulatan

Peran TNI AU pada masa revolusi kemerdekaan telah dibuktikan melalui beberapa operasi strategis, seperti pertempuran udara dan misi pengiriman logistik serta evakuasi. Studi yang dilakukan oleh Y.B. Mangunwijaya dalam *Sejarah*

Angkatan Bersenjata (1997) menjelaskan bahwa AURI turut berperan dalam menghalau agresi militer Belanda dengan melakukan serangan udara terbatas meskipun menghadapi tekanan yang sangat besar dari sisi kemampuan teknis.

Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949, TNI AU memasuki tahap rekonstruksi dan modernisasi yang lebih sistematis. Menurut Darmadi (2011) dalam jurnal *Pertahanan Nasional dan Strategi*, modernisasi dilakukan dengan peningkatan kualitas personel melalui pengiriman prajurit ke sekolah-sekolah penerbangan di luar negeri seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Australia. Pengadaan pesawat jet tempur mulai dilakukan pada era 1960-an, sebagai respons atas perubahan paradigma pertahanan udara yang menuntut teknologi lebih maju.

Menurut Nugroho (2009) dalam *TNI Angkatan Udara: Evolusi dan Perkembangan*, restrukturisasi organisasi dilakukan untuk meningkatkan efektivitas komando dan pengendalian. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, TNI AU bertransformasi dari angkatan udara yang sederhana menjadi institusi yang lebih modern dengan penambahan divisi-divisi seperti Penerbangan Tempur, Penerbangan Angkut, dan Dukungan Logistik.

Tantangan dalam Modernisasi dan Pengembangan Kapabilitas

Meski mengalami perkembangan, TNI AU menghadapi berbagai tantangan internal maupun eksternal. Menurut analisis yang dilakukan oleh H. Setiawan (2015) dalam artikel berjudul *Kendala Modernisasi Alutsista TNI AU*, keterbatasan anggaran dan kompleksitas pengadaan alutsista menjadi kendala utama. Indonesia pada dasarnya



masih bergantung pada pengadaan pesawat tempur dan sistem radar dari luar negeri, terutama dari Amerika Serikat dan Rusia, yang menimbulkan risiko ketergantungan teknologi dan politik.

Selain itu, peneliti lain seperti Sari (2017) dalam *Jurnal Pertahanan Indonesia* mengemukakan bahwa profesionalisme sumber daya manusia merupakan aspek penting yang harus terus ditingkatkan. Kualitas pelatihan dan pendidikan penerbang serta teknisi menjadi prioritas utama, sebab teknologi penerbangan yang semakin kompleks membutuhkan kemampuan teknis yang mumpuni. TNI AU mengimplementasikan berbagai program pelatihan di dalam dan luar negeri untuk mengatasi kesenjangan ini.

Peran TNI AU dalam Operasi Non-Perang dan Penanggulangan Bencana

Perkembangan TNI AU tidak hanya terbatas pada tugas pertahanan udara, melainkan juga pada operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Menurut laporan tahunan TNI AU tahun 2019, institusi ini terlibat aktif dalam misi evakuasi korban bencana alam seperti gempa bumi di Palu dan tsunami di Selat Sunda. Peran ini mengukuhkan posisi TNI AU sebagai institusi multifungsi yang mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung stabilitas sosial dan kemanusiaan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Syafri (2020) dalam *Studi Strategis Pertahanan*, keterlibatan TNI AU dalam operasi non-perang menuntut peningkatan kemampuan logistik dan mobilitas udara. Penggunaan pesawat angkut dan helikopter dalam misi kemanusiaan menambah dimensi tugas yang harus diemban oleh TNI AU di luar operasi militer konvensional.

Perspektif Strategis dan Geopolitik

Dalam konteks strategis, keberadaan TNI AU di era kontemporer sangat dipengaruhi oleh dinamika geopolitik regional dan global. Studi oleh Nugraha dan Dewi (2021) dalam *Jurnal Strategi Pertahanan* menekankan bahwa persaingan kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara, khususnya sengketa wilayah di Laut Cina Selatan, memaksa TNI AU untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan intelijen udara. Ancaman multidimensional, termasuk serangan siber dan penggunaan teknologi drone, turut menjadi perhatian dalam pengembangan doktrin pertahanan udara.

Sutrisno (2018) dalam *Teori Pertahanan Nasional* menguraikan bahwa TNI AU berperan sebagai pilar utama dalam sistem pertahanan nasional yang mengedepankan konsep pertahanan semesta. TNI AU tidak hanya bertugas mengamankan wilayah udara, tetapi juga mendukung operasi darat dan laut melalui fungsi dukungan udara dan pengintaian strategis.

METODE

Kajian pada penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara Kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek atau objek penelitian, sebagai Upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara Ilmiah dan termasuk keabsahannya. (Ruslan, 2006).

Metode yang dipakai dalam penelitian ini termasuk Deskriptif Kualitatif yaitu dengan memberi gambaran tentang bagaimana Sejarah Perjuangan TNI Angkatan Udara (AU) Pasca Kemerdekaan.

Peneliti kualitatif menurut Bogdan & Taylor adalah prosedur Penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang dapat diamati yang



diarahkan Pada latar dan individu secara holistik (utuh). Secara harifiah, sesuai dengan namanya, penelitian kualitatif adalah Jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperbolehkan melalui prosedur Kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukuran angka. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan Aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta. (Gunawan, 2013).

John W. Creswell dalam Hamid Patilima mendefinisikan pendekatan Kualitatif sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah Sosial atau masalah manusia berdasarkan pada penciptaan gambar holistik Yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara Terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah. (Patilima, 2011).

Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat sertai uraian Bahkan dapat berupa cerita pendek. Data kualitatif amat bersifat subjektif, Karenanya peneliti yang menggunakan data kualitatif sesungguhnya harus Berusaha sedapat mungkin untuk menghindari sikap subjektif yang dapat Mengaburkan objektivitas data penelitian.

Sumber Data terdiri Data Primer, yakni Wawancara dengan veteran TNI AU, sejarawan, dan saksi sejarah yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Observasi langsung di lokasi-lokasi bersejarah yang terkait dengan perjuangan TNI AU. Kemudian, Data Sekunder, yakni Dokumen sejarah, arsip, dan literatur yang relevan, termasuk buku, artikel, dan laporan resmi mengenai TNI AU dan perjuangan kemerdekaan.

Teknik Pengumpulan Data, terdiri dari Wawancara Mendalam, yakni Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai pengalaman dan

pandangan mereka. Studi Dokumen: Mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen sejarah yang berkaitan dengan TNI AU dan peristiwa-peristiwa penting pasca kemerdekaan. Observasi Partisipatif: Mengamati kegiatan yang berkaitan dengan peringatan atau acara yang merayakan sejarah TNI AU.

Pada analisis data kualitatif, kita membangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum. Pertanyaan bisa dibuat oleh peneliti untuk melihat hubungan antara berbagai tema yang di identifikasikan, hubungan Perilaku atau karakteristik individu seperti umur dan jenis kelamin. (Patilima, 2011) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi.

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara teliti dan Sistematis atas gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti yaitu Pengamatan Mengenai TNI Angkatan Udara (AU). Data wawancara yang penulis peroleh melalui tanya jawab antara Penulis dengan informan kemudian dianalisis dengan menggunakan kalimat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi seorang proklamator kemerdekaan Indonesia yang bernama Soekarno dan rekannya Hatta mengatasnamakan Bangsa indoneisa memproklamasikan kemerdekaan di jalan Pegangsaan Timur No, 56 Jakarta dengan dihadiri oleh para pemuda Jakarta. pada sore harinya Para pemuda menunjukkan tekadnya mempertahankan kemerdekaan Indonesia di hadapan Soekarno-Hatta, proklamator kemerdekaan negara itu, dalam parade besar sore harinya. Bangsa Indonesia



berjuang untuk mempertahankan kemerdekaannya dari ketakutan akan kembalinya belenggu penjajahan Belanda dan Jepang setelahnya. (Diswapersau, 2004)

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang dengan tanggung jawab penyusunan Rancangan Undang-Undang Dasar Indonesia, bersidang keesokan harinya, 18 Agustus 1945. Keputusan-keputusan penting sidang ini merupakan pengesahan Undang-Undang Dasar Indonesia dengan suara bulat. Rencana Konstitusi dan pengangkatan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Mohamad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu, PPKI mengesahkan pengangkatan menteri dan pembentukan kabinet dengan 12 kementerian pada sidang kedua pada 19 Agustus 1945, salah satunya adalah kementerian keamanan Rakyat. (Poerwoko, 2001)

Pada sidang tanggal 22 Agustus 1945, Memutuskan untuk segera membentuk tentara nasional. keputusan ini kemudian ditunda. Alasan politik penundaan ini termasuk berlanjutnya sentimen anti-fasis dan anti-militer setelah Perang Dunia II. Selain itu, gabungan pasukan Sekutu dan Jepang yang dikomandani Komando Sekutu diyakini akan melancarkan serangan. Sementara itu, keterampilan tersebut berada di luar kemampuan kekuatan nasional saat ini. Presiden dan PPKI akhirnya memutuskan untuk menunda pembentukan Tentara Nasional karena faktor-faktor tersebut. Indonesia memutuskan untuk menggunakan diplomasi agar Sekutu mengakui keberadaan NKRI. (Diswapersau, 2004)

Dalam rapatnya tanggal 23 Agustus 1945, PPKI menetapkan tiga wadah perlawanan, diantaranya:

1. Komite Nasional Indonesia (KNI) yang bertugas membantu presiden dalam tugas pemerintahan.
2. Partai Nasioanal Indonesia (PNI) yang bertugas memperjuangkan kemerdekaan dalam bidang politik dan sekaligus merupakan motornya revolusi.
3. Badan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang bertugas menjaga terjaminnya keamanan dan ketertiban umum. (Diswapersau, 2004)

Karena Sekutu akan memandang PNI serupa dengan Partai Nazi di Jerman atau Partai Fasis di Italia, hal ini membuat PNI tidak bisa menjadi partai perintis dan dapat berdampak negatif terhadap pembangunan Indonesia. Masyarakat dari seluruh pelosok tanah air mendukung pembentukan organisasi KNI dan BKR. KNI dan BKR diubah menjadi organisasi massa. Pada kenyataannya, BKR lebih dari sekedar “Penjaga”; Korps Pejuang Bersenjata yang menemukan roda pertempuran dan memelopori pengambilalihan otoritas militer dan sipil oleh Jepang. (Diswapersau, 2004)

Ketika BKR berdiri pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden memerintahkan seluruh rakyat Indonesia untuk tetap tenang, menjaga ketertiban, dan bersiap berperang untuk kemerdekaan negaranya. (Poerwoko, 2001) Diamatkan agar seluruh mantan pasukan HEIHO, PETA (Pembela Tanah Air), pelaut, dan pemuda lainnya untuk sementara bergabung dan bertugas di BKR. Mereka nantinya akan dipanggil untuk bergabung dengan Tentara Nasional Indonesia sebagai tentara.

Banyak anak muda, terutama dari PETA dan HEIHO, yang mendaftar untuk bergabung dengan BKR di lokasi yang pengumuman pendiriannya cepat diketahui. Secara umum, BKR hanya didirikan di wilayah Jawa yang



mendapat informasi mengenai berita tersebut. (Diswatpersau, 2004) Misalnya, BKR di wilayah Sumatera Timur belum terbentuk. Tidak semua pemuda mengetahui berdirinya BKR, dan organisasi yang mendukung pembentukan tentara nasional tidak bersedia mendaftar karena mereka yakin BKR tidak mencapai tujuan mereka.

Berbagai nama badan perjuangan didirikan oleh organisasi BKR. Mereka biasanya berasal dari kelompok yang mendirikan organisasi legal dan terlarang sepanjang era Jepang. Misalnya saja Angkatan Muda Indonesia (API) di Jakarta, Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (P3I) di Bandung, dan Angkatan Muda Indonesia (AMI) di Surabaya. (Chalil, 1984) Di Padang Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI), di Kalimantan Selatan Barisan Pemuda Republik Indonesia (BPRI). Di daerah Sulawesipun terdapat juga Badan Perjuangan bersenjata, misalnya di Pare Pare, Palopo, dan Bonthain. BKR memimpin upaya perampasan senjata api dari tangan Jepang Karena mendesakny situasi saat itu, padahal BKR seolah-olah merupakan lembaga yang menjaga keamanan daerah. Kedua organisasi ini sebenarnya sudah mulai menjalankan tugas-tugas militer sebelum terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat (TKR) karena badan-badan perjuangan juga melakukan tindakan yang sama. Perjuangan BKR sebagian besar sejalan dengan tujuan awalnya yaitu sebagai pelindung perjuangan bangsa Indonesia di berbagai bidang, mengingat terbentuknya KNI di daerah dan kebutuhan konflik pada saat itu. Banyak nama BKR, antara lain BKR Laut, BKR Kereta Api, BKR Pos, BKR Udara, dan lain-lain, yang muncul sesuai dengan bidang tanggung jawab dinasnya sebagai akibat adanya perubahan bidang perjuangan.

Setelah berhasil menangkap dan menguasai unsur penerbangan, maka didirikanlah BKR Udara di daerah atau pusat pangkalan. Pada tanggal 2 Oktober 1944, Surojo, mantan penembak udara militer Belanda, dan timnya memimpin serangan dan menguasai Pangkalan Udara Maguwo di Yogyakarta Timur bersama BKR. Tentara Jepang sangat ketakutan dengan serangan ini sehingga mereka tidak dapat mempertahankan diri, dan banyak dari mereka yang melarikan diri untuk bersembunyi di terowongan yang telah dibuat sebelumnya untuk perlindungan. Pasukan Jepang akhirnya menyerah sehingga seluruh pangkalan udara Maguwo termasuk kurang lebih 50 pesawat beserta fasilitas lainnya dapat dikuasai. (Diswatpersau, 2004) Meski mempunyai persenjataan yang kuat, pasukan Jepang hanya memberikan perlawanan minimal dalam perebutan Pangkalan Udara Andir Bandung pada 10 Oktober 1945. Sikap tersebut diambil Jepang karena beberapa hari sebelumnya, panglima tentara Jepang di Pangkalan Udara Andir dan Basyir Surya, Ketua Perpela (Himpunan Pegawai Lapangan Andir), sempat membahas kesediaan Jepang untuk menyerahkan senjatanya kepada pemuda Indonesia. Saat itu, M Jacob sedang membawa bendera merah putih yang kemudian dikibarkan di atas menara lapangan.

Pada tanggal 20 September 1945, pejuang Pasukan Polisi Badai (PPP) dengan bantuan tenaga teknis lapangan udara Bugis berhasil menyerang dan menguasai Pangkalan Udara Bugis Malang. Ketika Jepang menyerah, puluhan jenis pesawat berbeda dirampas, bersama dengan 167 senjata dan perangkat keras militer lainnya. (Chalil, 1984) Di bawah kepemimpinan Sjamsu Hardjoudaja, Barisan Rakyat Indonesia (BRI) berhasil merebut Pangkalan Udara



Morokrempangan pada tanggal 9 Oktober 1945 dengan mengibarkan bendera Merah Putih. Karena tentara Jepang saat itu sudah dalam keadaan siaga tempur, dengan senapan mesin ringan yang siap di parit sepanjang pintu masuk Morokrempangan maka kebijakan KNI setempat untuk menyelamatkan pertumpahan darah dalam pengambilalihan pangkalan menyebabkan tertundanya penguasaan pangkalan udara ini selama satu minggu.

Pangkalan Udara Pandanwangi di Lumajang merupakan salah satu pangkalan udara yang direbut oleh BKR, yang sebelumnya diduduki tentara Jepang. Selain pangkalan udara Pandanwangi, Panasan di Solo, Kalibanteng di Semarang, Cibeureum di Tasikmalaya, Jatiwangi di Cirebon, Cililitan di Jakarta, Gorda di Banten, Kalijati di Subang dan beberapa tempat di luar Jawa pun ikut direbut. Dengan demikian BKR Udara hanya terdapat di daerah-daerah tertentu saja yang tumbuh dan berkembang sendiri, karena masing-masing secara organisasi di bawah wewenang KNI-KNI setempat. Pembentukan BKR ditekankan lagi oleh Presiden Soekarno dalam amanatnya tertanggal 23 Agustus 1945 diserukan kepada rakyat Indonesia untuk tetap tenang, memegang teguh disiplin dan siap sedia berjuang untuk Indonesia. Kepada para eks prajurit PETA, Heiho, Pelaut dan pemuda-pemuda lain diserukan untuk sementara waktu masuk dan bekerja dalam BKR. Sehingga dalam beberapa bulan berikutnya Indonesia lebih melakukan penyelesaian masalah internal dan memperkuat struktur pemerintahan, khususnya masalah BKR udara atau TKR Djawatan Udara.

Pada tahun 1945 yang dikenal masa berakhirnya Perang Dunia II, antara Pemerintah Inggris dan Pemerintah Belanda terjalin kerjasama dalam menyelesaikan negara bekas jajahan, khususnya Hindia

Belanda. Kerjasama itu tertuang dalam “*Civil Affair Agreement*” yang ditandatangani pada tanggal 24 Agustus 1945, di Gedung Chequers, Istana Perdana Menteri Inggris di London Selatan. Persetujuan ini terkenal dengan “Persetujuan Chequers”, di dalam persetujuan tersebut Inggris berjanji akan membantu Belanda untuk berkuasa kembali di Indonesia. Karena itu pasukan Inggris yang tergabung dalam *Allied Forces Netherland East Indies* (AFNEI) mempunyai tugas rangkap. Di samping melucuti tentara Jepang dan mengurus tawanan perang yang ada di Indonesia juga membantu mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia sampai dengan awal tahun 1946. Setelah mendapat pancangan kaki yang kuat di Indonesia, Inggris memberi ruang gerak kepada Belanda untuk mempersiapkan diri menguasai Indonesia dengan mendatangkan pasukannya.

Dalam memberi ruang gerak yang lebih leluasa, Belanda menerima pelimpahan kekuasaan dari Inggris, sementara itu pihak Inggris mengajukan gencatan senjata kepada Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan perundingan penyelesaian politik. Dengan perantara Inggris, Republik Indonesia dan Belanda maju ke meja perundingan, baik yang diadakan di Hoge Veluwe Belanda maupun di Indonesia. Dalam perundingan tersebut duduk wakil-wakil Sekutu (Inggris), Belanda (Nica) dan Republik Indonesia. Dalam perundingan politik pada tanggal 15 Nopember 1946, tercapai kesepakatan yang terkenal dengan “Perjanjian Linggajati” selanjutnya gencatan senjata diadakan pada bulan Februari 1947. Setelah perjanjian Linggajati ditandatangani timbul kesulitan baru dalam pelaksanaannya. Perbedaan tafsiran atas pasal-pasal perjanjian itu menjadi pangkal perselisihan besar antara Republik Indonesia dan Belanda. Pada tanggal 27 Mei 1947 Komisi Jenderal menyampaikan nota kepada pemerintah



Republik Indonesia. Belanda tetap berpendirian pada pidato Ratu Belanda dan bahkan menuntut supaya di dalam gendarmerie bersama akan membahayakan pertahanan Republik Indonesia dan menghilangkan kedaulatan TNI.

Nota penolakan itu dikirim oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 8 Juni 1947 dan dibalas oleh pihak Belanda pada tanggal 15 Juli 1947. Dalam balasannya Belanda tetap menuntut supaya hal itu tetap dilaksanakan, selain itu juga menuntut supaya sebelum tanggal 16 Juli 1947 Republik Indonesia menghentikan permusuhan terhadap Belanda. Ketika balasan Republik Indonesia tidak datang, maka pada tanggal 16 Juli 1947 Belanda mengirimkan ultimatum agar notanya tanggal 15 Juli 1947 dijawab Republik Indonesia dalam waktu 32 Jam. Ketika pemerintah Republik Indonesia tidak dapat menjawabnya, maka pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan Agresi Militernya ke seluruh wilayah Republik Indonesia. Tujuan Agresi Militer itu adalah menduduki seluruh Jawa Barat, perluasan daerah-daerah yang telah diduduki di kota-kota besar di Jawa seperti Semarang dan Surabaya serta pendudukan daerah perkebunan dan minyak di Sumatera seperti Deli, Palembang dan sekitarnya. Dengan demikian maksud pemerintah Belanda bukanlah menduduki seluruh Jawa dan menghancurkan Republik Indonesia, tetapi hanya ingin menguasai daerah-daerah yang ekonominya kaya.

Belanda yang dibantu oleh sekutu merasa dirinya kuat melakukan agresi militer dan mulai menerobos masuk ke dalam teritorial Indonesia. Maka tentara Sekutu mulai menduduki kota-kota besar di Indonesia. Pendaratan pertama tentara Sekutu terjadi di Jawa dan Sumatera, dimana NICA

(*Netherlands Indies Civil Administration*) datang bersama-sama Inggris mendaratkan pasukan-pasukannya. Rakyat Indonesia yang mengetahui maksud Belanda untuk mengembalikan status jajahan bagi wilayah Indonesia, menyongsong tantangan tersebut dengan tekad sekali merdeka, tetap merdeka. Rakyat dan khususnya pemuda Indonesia serta merta mengangkat senjata untuk menghalau penjajah, sehingga sejak saat itu pula berkobarlah pertempuran-pertempuran diberbagai tempat. (Nasution, 1984).

KESIMPULAN

Perjuangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) pasca proklamasi kemerdekaan merupakan bagian integral dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Dibentuk pada 29 April 1946, TNI AU lahir di tengah keterbatasan sumber daya dan tekanan situasi politik-militer yang tidak stabil. Namun demikian, dengan semangat juang yang tinggi dan nasionalisme yang kuat, TNI AU berhasil membangun kekuatan udara yang tangguh dan berperan aktif dalam berbagai operasi militer, seperti merebut dan menguasai pangkalan-pangkalan udara strategis dari tangan Jepang dan Belanda.

Transformasi TNI AU tidak hanya mencakup aspek militer, melainkan juga mencerminkan dinamika sosial dan politik Indonesia. Pengiriman pilot ke luar negeri, pengadaan alutsista modern, dan peran aktif dalam misi kemanusiaan menjadi bukti bahwa TNI AU berupaya untuk berkembang secara profesional sekaligus adaptif terhadap perubahan zaman.

Dengan demikian, TNI AU tidak hanya berfungsi sebagai penjaga kedaulatan udara, tetapi juga sebagai simbol perlawanan, profesionalisme, dan dedikasi terhadap



bangsa. Sejarah perjuangan ini menjadi fondasi penting dalam membangun kedirgantaraan nasional dan memperkuat identitas serta ketahanan Indonesia sebagai negara merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

- Alrianingrum Septian. (2017). Lembaga Pendidikan Penerbangan Angkatan Udara Yogyakarta Tahun 1945-1965. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 5, No. 1.
- Chalil Moch. (1984). *Seri Materi Kejuangan Bangsa: Peboman Udara Semarang, Salat Tiga dan Ambarawa*. Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata.
- Diswapersau Subdisjarah. (2004). *Sejarah TNI Angkatan Udara Jilid 1 (1945-1949)*. Jakarta.
- Darmadi, A. (2011). Modernisasi Alutsista TNI AU dan Tantangannya. *Jurnal Pertahanan Nasional dan Strategi*, 5(2), 45-58.
- Gunawan Imam. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Kemerdekaan.
- Haryanto. (2010). "Sejarah TNI AU: Dari Awal Hingga Era Modern." *Jurnal Pertahanan*, No. 3. Jakarta: My Home My Base.
- Mangunwijaya, Y. B. (1997). *Sejarah Angkatan Bersenjata*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nasution, A. H. (1984). *Sekitar Perang Kemerdekaan*. Bandung: Disjarahad.
- Nugroho, S. (2004). *Sejarah TNI Angkatan Udara*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Nugroho, S. (2009). *TNI Angkatan Udara: Evolusi dan Perkembangan*. Jakarta: Pusat Sejarah TNI AU.
- Nugraha, R., & Dewi, P. (2021). *Strategi Pertahanan TNI AU di Kawasan Asia Tenggara*. *Jurnal Strategi Pertahanan*, 12(1), 33-47.
- Oerip Soemohardjo. (1952). *Sejarah Tentara Nasional Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Lembaga Sejarah Militer.
- Patilima Hamid. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Poerwoko Djoko. (2001). *Perjalanan Sejarah Pangkalan Udara Iswahjudi 1939-2001*. Raja.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia Since c.1300*. Stanford University Press.
- Ruslan Rosady. (2006). *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. Jakarta: PT Pengetahuan Indonesia.
- Saleh Abdulrahman. (1995). *Perjuangan TNI Angkatan Udara dalam Mempertahankan Kemerdekaan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sari, D. (2017). Profesionalisme Sumber Daya Manusia dalam TNI AU. *Jurnal Pertahanan Indonesia*, 8(3), 21-35.
- Siahaan, Eko. (2016). *Transformasi TNI AU dalam Era Modern*. Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Setiawan, H. (2015). Kendala Modernisasi Alutsista TNI AU. *Jurnal Pertahanan dan Keamanan*, 6(1), 50-65.
- Subdisjarah Diswapersau. (2004). *Sejarah TNI Angkatan Udara Jilid 1 (1945-1949)*. Jakarta.
- Syafri, A. (2020). Peran TNI AU dalam Operasi Non-Perang dan Penanggulangan Bencana. *Studi Strategis Pertahanan*, 9(2), 78-90.
- Sutrisno, B. (2018). *Teori Pertahanan Nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.